

KEBIJAKAN PUBLIK MENYANGKUT PENDIDIKAN DAN KESETARAAN GENDER

Oleh: **Harist Hafid¹, Budi Harsono² dan Bibit Santoso³**

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama), Jalan Hang Lekir I
No 8 Jakarta Pusat 10270, DKI Jakarta, Indonesia dan

³Lemhanas Republik Indonesia, JL.DR Abd. Rahman Saleh No 23 Senen Jakarta Pusat 65412

Email: haristhafid@gmail.com¹, budiharsono@dsn.mpestopo.ac.id² dan bibit.santoso17@gmail.com³

Abstract

Promoting gender equality is a major part of the development strategy in order to empower the community. Education has a role to play in providing an opportunity to rectify gender inequality. Gender mainstreaming in education is intended to ensure that policies, programs and educational activities provide opportunities and benefits the same for girls and boys. Education is very important for the empowerment of women. Education allows girls and boys participate in social life, economy, and politics. Achieve equality in learning opportunities and achievement of learning outcomes for men and women is a major challenge.

Keywords: Gender Equality, Education

A. Pendahuluan

The Dakar Framework for Action merupakan komitmen politik internasional yang paling penting untuk mempromosikan pendidikan untuk semua. Kerangka tersebut mengandung dua tujuan berbasis gender. Dalam Pasal 7 (ii) peserta berkomitmen untuk mengurangi 'disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun

2005'. Komitmen kedua adalah untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan (Pasal 7 (v)). Hal ini digambarkan sebagai 'kesetaraan gender'. Diskriminasi berbasis gender dalam pendidikan merupakan sebab dan akibat dari perbedaan yang mengakar dalam masyarakat. Kemiskinan, isolasi geografis, latar belakang etnis, kecacatan, sikap tradisional tentang status mereka melemahkan kemampuan perempuan dan anak perempuan untuk menggunakan hak mereka.

Salah satu tuntutan dalam dunia pendidikan adalah adanya keadilan dan kesetaraan gender baik dari segi aspek akses, mutu maupun pada aspek manajemen pendidikan. Pengembangan model pembelajaran responsif gender merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai budaya bias gender. Pembelajaran menjadi responsif gender dapat dilakukan melalui dua aspek yaitu materi ajar dan proses belajar mengajar. Kesenjangan pada bidang pendidikan telah menjadi factor utama yang sangat berpengaruh terhadap bidang lain di Indonesia, hampir semua sektor, seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran dimasyarakat, sampai pada masalah menyuarakan pendapat

antara laki-laki dan perempuan yang menjadi faktor penyebab bias gender adalah karena faktor kesenjangan pendidikan yang belum setara.

B. Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender merupakan persoalan pokok pembangunan-suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesenjangan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) - perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Perempuan masih memiliki keterbatasan akses atas beragam sumber daya produktif, termasuk pendidikan, tanah, informasi, dan keuangan. Di Asia Selatan, rata-rata jumlah jam yang digunakan perempuan bersekolah hanya separuh dari yang digunakan laki-laki, dan jumlah anak perempuan yang mendaftar ke sekolah menengah hanya dua pertiga dari jumlah anak laki-laki. Banyak perempuan tidak memiliki tanah, dan meski mereka memilikinya, status kepemilikannya lebih lemah daripada laki-laki. Di banyak negara berkembang, wirausaha yang dikelola oleh perempuan cenderung kekurangan modal, kurang memiliki akses terhadap mesin, pupuk, informasi tambahan, dan kredit dibandingkan wirausaha yang dikelola laki-laki. Kesenjangan semacam ini, baik dalam pendidikan maupun sumber daya produktif lainnya, berdampak buruk terhadap kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kontribusi mereka dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangga (Bank Dunia : 2000).

Pembedaan peran gender sangat membantu untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat

pada manusia perempuan dan laki laki. Dengan mengenali perbedaan gender sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak permanen sehingga memudahkan untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki yang dinamis yang lebih tepat dan cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan memisahkan perbedaan jenis kelamin biologis yang bersifat permanen dan statis itu tidak dapat digunakan sebagai alat analisis. Perbedaan konsep gender secara social telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Dengan demikian gender adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki- laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender itu melekat pada cara pandang masyarakat, sehingga masyarakat sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki (Dina Ampera : 2012).

Kesenjangan gender adalah hak asasi manusia. Wanita berhak untuk hidup dengan martabat dan dengan kebebasan dari keinginan dan ketakutan. Kesenjangan gender juga merupakan prasyarat untuk memajukan pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap kesehatan dan produktivitas seluruh keluarga dan masyarakat. Di samping itu, mereka juga dapat meningkatkan prospek untuk generasi berikutnya. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa sentralitas

pemberdayaan perempuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan dan mengatasi tantangan yang paling mendesak di dunia serta kesetaraan gender masih merupakan janji yang tak terpenuhi.

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan: 1) mendidik anak perempuan; 2) meningkatkan tingkat melek huruf di kalangan perempuan; 3) meningkatkan intervensi pengembangan anak usia dini; 4) meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dan memperkuat kebijakan tenaga kerja yang mempengaruhi perempuan; 5) meningkatkan akses perempuan terhadap kredit, tanah dan sumber daya lainnya; 6) mempromosikan hak-hak dan partisipasi politik perempuan; 7) memperluas program kesehatan reproduksi dan kebijakan dukungan keluarga (www.worldbank.org).

Di negara-negara di seluruh dunia, faktor kemiskinan yang berakar pada norma-norma sosial yang diskriminatif memberi peluang besar pada terjadinya ketidaksetaraan gender. Pendidikan memiliki peran untuk bermain dalam memberikan kesempatan untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini. Pemberdayaan perempuan misalnya, melalui kelas melek huruf dan partisipasi sebagai pemimpin dalam asosiasi sekolah dipandang sebagai strategi peningkatan kesetaraan gender.

Pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB mengadopsi Deklarasi Milenium. Berdasarkan Deklarasi tersebut, PBB menyusun delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) untuk menyediakan satu set *benchmark* untuk mengukur kemajuan pemberantasan kemiskinan global. Salah satu dari tujuan tersebut adalah menciptakan kesetaraan gender. MDG tujuan ke-3 bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, termasuk di dalamnya bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan partisipasi perempuan dalam perwakilan politik. Ada delapan kebijakan

utama dan / atau tindakan yang memiliki potensi untuk mendorong kemajuan (United Nations Development Group : 2010):

1. Menghilangkan hambatan untuk pendidikan anak perempuan, termasuk dengan memberikan beasiswa, bantuan tunai; pelacakan tingkat penyelesaian dan kehadiran; meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di sekolah
2. Membuat penciptaan lapangan kerja yang mengurangi kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki; memperkenalkan langkah-langkah perlindungan sosial dan hukum perburuhan dan kebijakan yang responsif gender; dan memperkenalkan dan menegakkan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang paling rentan. Perhatian khusus harus diberikan kepada kesenjangan gender dalam sekolah, membuat pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan permintaan pasar tenaga kerja.
3. Meningkatkan jumlah dan pengaruh perempuan dalam semua pengambilan keputusan politik, termasuk dengan berinvestasi dalam kepemimpinan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan lokal.
4. Berinvestasi dalam kesehatan seksual dan reproduksi sebagai dasar utama untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, termasuk kesehatan masyarakat untuk mengatasi kematian kematian ibu.
5. Meningkatkan kapasitas nasional dalam penggunaan data dan statistik jenis kelamin terpilah termasuk pada penggunaan waktu.
6. Mengurangi beban kerja perempuan melalui investasi di bidang infrastruktur, dan paket stimulus ekonomi yang gender responsif
7. Memperkuat akuntabilitas untuk meningkatkan hak-hak perempuan yang sejalan

dengan komitmen yang dibuat di bawah instrumen hak asasi manusia internasional, CEDAW, *Beijing Platform for Action*, dan Konvensi ILO yang relevan termasuk menghilangkan kesenjangan dalam akses terhadap tanah dan properti serta kebijakan dan program untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan

8. Meningkatkan dan memperhitungkan investasi dalam kesetaraan gender, termasuk melembagakan *Anggaran Responsif Gender* sebagai bagian dari reformasi pengelolaan keuangan publik yang memastikan bahwa terdapat komitmen keuangan yang sepadan dengan komitmen kebijakan untuk kesetaraan gender

C. Mendorong Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan

Sekolah merupakan suatu wadah pendidikan formal yang dikondisikan bagi anak didik yang bertujuan tidak hanya untuk pencapaian ilmu, namun wadah formal ini diharapkan juga mampu menyiapkan anak didik dengan moral, etika yang diperlukan guna memasuki tahapan kehidupan selanjutnya secara berharkat dan bermartabat. Sekolah Dasar atau pendidikan sejenis seperti Madrasah Ibtidaiyah, dianggap merupakan jenjang pendidikan yang sangat 'strategis' dan 'penentu utama' bagi kerangka pembentukan basis kerangka berpikir domain kemanusiaan peserta didik, dalam membentuk sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dasar (Dina Ampera : 2012).

Pengarusutamaan gender bidang pendidikan dimaksudkan untuk menjamin bahwa kebijakan, program dan kegiatan pendidikan memberikan kesempatan dan manfaat yang sama untuk anak perempuan dan laki-laki. Upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender telah sejak tahun 2000 digulirkan. Hal ini ditandai oleh lahirnya payung hukum kebijakan berupa Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Di bidang pendidikan, payung hukum kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun demikian, implementasi PUG di bidang pendidikan, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional telah dimulai sejak tahun 2002. Program utama yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang pendidikan dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) terhadap para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan, para perencana bidang pendidikan, para penulis buku/bahan ajar, para kepala/pimpinan satuan pendidikan, para tenaga pendidik dan kependidikan, dan stakeholders pendidikan lainnya. Kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan telah menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Nasional sejak 2002. Hal ini merupakan wujud dari komitmen internasional yang telah dituangkan dalam *The International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7/1984. Komitmen Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender juga mengacu pada komitmen internasional tentang *Education for All* (EFA) yang tertuang dalam Kesepakatan Dakar, yaitu (kemdikbud.go.id):

- a. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung
- b. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik.
- c. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua

manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai.

- d. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
- e. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.
- f. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (life skills) yang penting.

Di sisi lain dalam rangka meningkatkan

kesetaraan gender, UNICEF juga memiliki program yang diintegrasikan ke dalam kebijakan pendidikan nasional. Tiga tema prioritas dalam meningkatkan kesetaraan gender meliputi:

- akses yang sama dalam pendidikan universal;
- pemberdayaan melalui pendidikan anak perempuan dan pengarusutamaan gender

Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana kesetaraan dalam mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan yang baik dapat diakses melalui proses dan metode pembelajaran. Sedangkan untuk ukuran indikatornya menggunakan jumlah anak perempuan dan laki-laki yang masuk sekolah sampai dengan keseimbangan gender dalam kelas serta diskriminasi sosial dalam kelas (www.unicef.org):

Pendidikan memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan masyarakat. Mempromosikan kesetaraan dan mendorong keragaman adalah tujuan inti dari pendidikan. Hal ini bisa dilakukan melalui mendorong kesetaraan gender, memberikan kesempatan, membuka pintu akses, dan membangun lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Guru merupakan jantung

INTERVENTIONS FOR EDUCATING GIRLS AND BOYS			
Equal access to education	Equality within education quality	Equality through education	Examples of measurable indicators
Girls and boys out of school	Learning content: literacy, numeracy and life skills education	Female-male employment	Access Number of girls and boys out of school Quality Lerner-teacher ratio
Girls and boys enrolled in school	Learning-teaching methods and process	Gender differentials in wages across different levels	Access Number of girls and boys enrolled in school
Transition of girls and boys between levels of education	Subject choices	Democratic participation of females and males in school governing boards, PTAs, school leadership, or political posts such as parliament	Quality The gender balance within classroom Social discrimination within the classroom

Sumber : UNICEF

pendidikan. Pendidikan berkualitas membutuhkan guru yang berkualitas yang termotivasi dengan kondisi kerja yang adil, termasuk upah yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Guru harus dilatih untuk menangani dinamika seksisme, rasisme dan homophobia di kelas. Organisasi pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk sistem pendidikan dan mengembangkan masyarakat. Dengan demikian, organisasi pendidikan harus menjadi panutan dalam pengembangan nilai-nilai kesetaraan, keragaman dan pemberdayaan dalam semua aspek pekerjaan pendidikan.

Pendidikan sangat penting bagi pemberdayaan perempuan. Pendidikan memungkinkan anak perempuan dan anak laki-laki berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Di samping itu, pendidikan merupakan dasar untuk pengembangan demokrasi masyarakat. Manfaat sosial dan ekonomi pendidikan yang baik- dikenal sejak lama. Dalam hal ini kaum perempuan memperoleh manfaat yang besar dari pendidikan. Melalui pendidikan, baik perempuan maupun laki-laki dapat meningkatkan perannya dalam pembangunan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan yang baik akan mendorong adanya kesetaraan gender.

Ketidaksetaraan gender akan mempengaruhi struktur dan manajemen sistem pendidikan, praktek dan sikap guru, materi pembelajaran dan isi kurikulum. Intervensi di sektor pendidikan tidak dapat memecahkan masalah ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Namun, pendidikan dapat memiliki dampak besar pada kehidupan anak perempuan dan perempuan, anak laki-laki dan laki-laki. Pendidikan dapat menjadi sangat penting untuk mengubah sikap untuk menerima kesetaraan gender sebagai nilai sosial yang mendasar. Untuk waktu yang lama masalah kesetaraan gender dalam pendidikan selalu dihadapi oleh setiap negara. Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan akan diselesaikan

jika akses yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan tersedia dengan baik. Di samping itu, disparitas gender dalam angka pendaftaran juga dapat dieliminasi. Namun, pendekatan yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan kesetaraan gender, misalnya, konten pembelajaran pendidikan seperti kurikulum, buku teks dan praktek belajar mengajar.

Pendidikan yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender menghadapi sejumlah rintangan dan tantangan. Anak perempuan dan perempuan yang dirugikan dalam berbagai cara. Diperlukan adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah dan pelaksanaan strategi yang lebih holistik. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin lebar kesenjangan gender. Perempuan yang mengalami putus sekolah dan tertinggal dari pendidikan anak laki-laki merupakan masalah yang menjadi perhatian tertinggi di semua negara. Akses ke pendidikan menengah disebut-sebut sebagai salah satu masalah yang terbesar. Alasan utama dari kondisi ini adalah pendaftaran anak perempuan lebih rendah di pendidikan sekunder. Salah satu penyebabnya adalah sekolah menengah biasanya berlokasi di daerah perkotaan atau di pusat-pusat kabupaten, yang menyiratkan bahwa siswa harus berjalan jauh untuk sekolah atau harus tinggal di asrama selama berminggu-minggu. Kondisi semacam ini mempengaruhi jumlah perempuan yang masuk sekolah menengah lebih sedikit daripada laki-laki. Hal ini dikarenakan anak perempuan lebih rentan terhadap kerawanan dimana jalan tidak aman dan asrama sering tidak aman untuk anak perempuan. Lingkungan fisik sekolah juga disebutkan sebagai hambatan bagi partisipasi perempuan dalam pendidikan, terutama dari remaja dan seterusnya. Untuk mengembangkan sektor pendidikan dengan perspektif kesetaraan gender, maka perlu untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Kepemimpinan perempuan

adalah suatu keharusan dalam rangka untuk mengembangkan sektor pendidikan. Promosi perempuan untuk posisi kepemimpinan, misalnya seperti promosi guru perempuan untuk kepala sekolah dan direktur, disebut-sebut sebagai cara untuk mempromosikan kesetaraan gender (Swedish Agency for Development Evaluation : 2010).

Dalam dasawarsa terakhir, Indonesia telah mencapai banyak perbaikan dalam hal kesetaraan gender khususnya dalam akses pendidikan. Indonesia juga berada pada jalur yang tepat dalam upaya pencapaian Millennium Development Goals untuk pendidikan dasar universal dan paritas gender. Namun demikian, Pemerintah juga menyadari bahwa pencapaian hasil pendidikan tidak hanya didukung oleh adanya akses yang baik. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya dalam mendukung mutu, relevansi, dan pencapaian hasil juga telah dilakukan. Kesetaraan gender dalam pendidikan juga mencakup pengalaman murid laki-laki dan perempuan di sekolah. Berbagai pengalaman ini terkait dengan perlakuan yang setara oleh guru, kurikulum, buku teks, materi pembelajaran yang tanggap gender, dan juga lingkungan belajar dan hasil pembelajaran. Mencapai kesetaraan dalam kesempatan belajar serta pencapaian hasil belajar untuk laki-laki maupun perempuan merupakan tantangan utama Pemerintah Indonesia dalam dasawarsa mendatang. Guru dapat menjadi agen perubahan untuk kesetaraan gender dengan mendukung murid laki-laki maupun perempuan untuk ambil bagian dalam kegiatan tertentu. Guru perlu memberikan mereka tuntunan dan mulai bertindak sebagai panutan. Sebaliknya, guru juga dapat memperburuk disparitas dengan menyebarkan stereotip sosial di dalam kelas dan tidak memberikan dukungan kepada murid perempuan dan laki-laki pada saat mereka membutuhkan dukungan tersebut. Banyak

praktik yang baik yang dapat dilakukan dengan menggabungkan kesetaraan gender dalam kegiatan belajar mengajar. Hal-hal ini termasuk mengubah stereotip yang selama ini ada misalnya bersikap baik terhadap kemampuan murid perempuan dan laki-laki, memberikan perhatian yang setara kepada murid laki-laki maupun perempuan dan mendorong murid perempuan untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler yang biasanya diikuti oleh murid laki-laki (ACDP Indonesia : 2013).

D. Penutup

Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Diperlukan adanya perubahan pemahaman tentang kesetaraan gender di kalangan masyarakat kita di manapun. Tidak bisa dipisahkan antara kesetaraan gender di dalam dunia pendidikan dengan kesetaraan gender di dalam masyarakat. Apa yang ada di dalam dunia pendidikan merupakan gambaran dari pemikiran gender di masyarakat. Persoalan ketidaksetaraan gender terkait erat dengan diskriminasi. Di dalam dunia pendidikan, tidak ada undang-undang yang membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Karena gender merupakan konstruksi budaya, maka pandangan tentang gender yang bias harusnya bisa direkonstruksi. Di sinilah pendidikan berperan sangat besar untuk mengubah pola dan persepsi tersebut. Kondisi kesetaraan gender dalam pendidikan yang beragam memerlukan bentuk-bentuk intervensi yang bervariasi sehingga berbagai program yang dilaksanakan benar-benar dapat menurunkan kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

ACDP Indonesia, *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia*, Policy Brief September 2013

Ampera, Dina, "Kajian Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Di Sekolah Dasar Mitra PPL PGSD",
Jurnal Tabularasa PPS UNIMED Vol.9 No.2, Desember 2012

Bank Dunia, *Pembangunan Berperspektif Gender*, 2000

Swedish Agency for Development Evaluation, *Gender Equality in and through Education*, 2010

United Nations Development Group, *Thematic Paper On Mdg 3: Promote Gender Equality And Empower Women*, Maret 2010

UNICEF, "Operational Guidance Promoting Gender Equality through UNICEF-Supported Programming in Basic Education", diakses dari http://www.unicef.org/gender/files/BasicEducation_Layout_Web.pdf

"Kesetaraan Gender", diakses dari <http://paudni.kemdikbud.go.id/segment/79.html>

Promote Gender Equality and Empower Women by 2015, diakses dari <http://www.worldbank.org/mdgs/gender.html>